

**ANALISIS RISIKO PEMBERLAKUAN OTONOMI KHUSUS
BAGI RAKYAT PAPUA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA**

TESIS



SAMPARISNA O. DJ. KOIBUR

NIM :1604190001

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2020**

**ANALISIS RISIKO PEMBERLAKUAN OTONOMI KHUSUS
BAGI RAKYAT PAPUA DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA**

TESIS



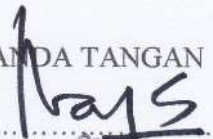
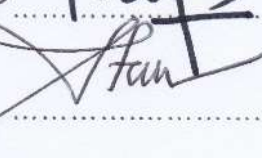
**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Manajemen**

SAMPARISNA O. DJ. KOIBUR

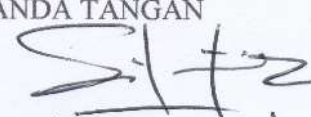
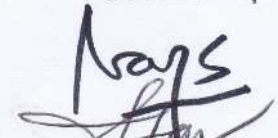
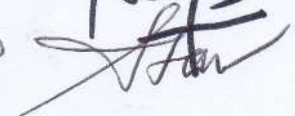
NIM :1604190001

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2020**

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (MM)
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Poerwaningsih S.L, MStR Pembimbing I	11 Juni 2020	
2	Dr. M. L Denny Tewu, MM Pembimbing II	11 Juni 2020	

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Ketut Silvanita, MA.	11 Juni 2020	
2	Dr. Poerwaningsih S.L, MStR	11 Juni 2020	
3	Dr. Denny Tewu. MM	11 Juni 2020	

Telah dinyatakan memenuhi syarat
Pada tanggal 11 Juni 2020

Kepala program studi Ilmu Manajemen
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia


Dr. Poerwaningsih S.L, MStR

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen dari Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, Juni 2020


Samparisna O. Dj. Koibur



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : SAMPARISNA O. Dj. KOIBUR

NIM : 1604190001

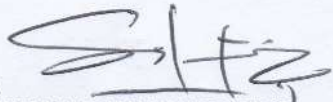
Program Studi : Magister Manajemen

Judul Tesis : Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Dikabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

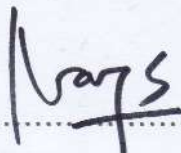
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

DEWAN PENGUJI

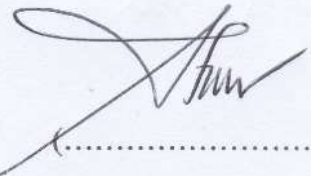
Penguji : Dr. Ketut Silvanita, MA


(.....)

Penguji : Dr. Poerwaningsih S.L, MStr


(.....)

Penguji : Dr. Denny Tewu, MM


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 11.. Juni 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “**Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua**”. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena Dosen Pembimbing Penulis yang memberikan dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Bintang Simbolon, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Poerwaningsih S. Legowo, M.STr selaku ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, dan selaku dosen pembimbing pertama saya yang dengan penuh kesabaran selalu memberi motivasi, semangat, pikiran, ide dan nilai nilai integritas dalam membimbing penulis.
4. Dr. Denny Tewu. MM selaku dosen pembimbing kedua saya yang dengan penuh kesabaran selalu memberi motivasi, semangat, pikiran, ide dan nilai nilai integritas dalam membimbing penulis.
5. Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, CIMBA, Ir. T. Sunaryo, MA, Ph.D, Dr. Indra Gunawan, ST., MT, DR. Martua E. Tambunan, S.E., Ak.,Msi., CA, Dr. Ketut Silvanita, MA. dan seluruh dosen Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada Penulis.

Terimakasih juga kepada Dr. Maruarar Siahaan S.H, MH sebagai orang tua bagi kami di Jakarta yang selalu memberikan spirit dan semangat

6. Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Herry Ario Naap, SSI. MPd, dan pimpinan pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor, secara khusus bapak Kepala Distrik Biak Kota, Bapak Kepala Distrik Samofa, Para Lurah dan Kepala Kampung di kabupaten Biak Numfor yang telah mendukung dan memberikan bantuan. Terima kasih juga kepada adik Kumi Rumpaidus selaku lurah Wapnour, Biak Kota, Bapak Deden dan Adik Risky

Mairuhu, serta Mama Aksamina Mandosir dan adik Jeanny Morin yang dengan setia memberikan support dan semangat.

7. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua sebagai gereja Tuhan dimana kami lahir, bertumbuh, belajar dan melayani, kesana ilmu dan pengetahuan ini diperuntukkan untuk melayani dan membangun umat Tuhan di Tanah Papua dan bumi Indonesia.
8. PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang kelas dunia di Tanah Papua. Lebih dari 20 tahun kami melayani disana dalam fungsi sebagai rohaniawan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, masyarakat, penanganan HAM dan hubungan industrial, hamba belajar dan dididik untuk bekerja dan melayani dalam berbagai situasi dan kondisi
9. Istri tercinta DR. Roseline Iren Rumaseum, M.Kes, anak – anak terkasih Rainer Christmas Mecharl Koibur, Beatrix Junior Cleopatra Koibur dan semua keluarga yang lainnya selama ini mendukung dan memotivasi penulis.
10. Orang tua terkasih Ds.Mesach Koibur dan Almarhum Bapak Habel L.Rumaseuw, Almarhumah Ibu Yosephine Infaindan, Almarhumah Ibu Beatrix Rumbino dan semua saudara – saudari yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu. Semoga Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata, perjalanan waktu dalam kata dan karya yang akan menyempurnakan ketika daya ini dapat menjadi berkat bagi sesama.

Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, Juni 2020

Samparisna O. Dj. Koibur

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMPARISNA O. DJ. KOIBUR
NIM : 1604190001
Program Studi : Magister Manajemen
Pascasarjana : Universitas Kristen Indonesia
JenisKarya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentukp angkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Padatanggal :Juni 2020

Yang menyatakan


(SAMPARISNA O. DJ. KOIBUR)



ABSTRAK

Nama : Samparisna O.Dj. Koibur
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Analisis Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Dikabupaten Biak Numfor Provinsi Papua

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua Dikabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Data penelitian ini diperoleh dari metode penyajian data dari hasil tanggapan responden (Kuisisioner), serta hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dan juga memakai hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian yang diteliti. Dalam hal ini, data primer dari Kabupaten Biak Numfor. Analisis memakai pendekatan yang digunakan ialah *risk assessment matrix* dan menganalisis dengan model analisis *Heat Map*. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses bisnis Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua mengidentifikasi 15 (lima belas) hal memiliki nilai *risk assessment matrix* dengan kategori tinggi dan ada 6 hal yang harus perlu perhatian khusus sebagai berikut; terkait pelaksanaan HAM, apakah pemerintah Biak Numfor membentuk perwakilan komisi nasional HAM, pengadilan HAM, dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di provinsi Papua telah sesuai dengan perundang – undangan? nilai risiko sebesar 18. Terkait dengan keagamaan, apakah pemerintah Biak Numfor telah memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing – masing? nilai risiko sebesar 18. Apakah para pejabat pemerintah daerah Biak Numfor sudah tau bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) berbagai hal yang menyangkut Keuangan: sumber – sumber penerimaan provinsi, sumber – sumber pendapatan asli provinsi Papua, dana perimbangan bagian provinsi Papua, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dll nilai risiko sebesar 17,06. Apakah para pejabat Pemda Biak Numfor tahu akan kewenangan provinsi Papua yaitu mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, fiskal, agama dan peradilan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan? nilai risiko sebesar 17,1. Apakah pemerintah Biak Numfor sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati? risiko sebesar 17,2. Apakah pemerintah Biak Numfor sudah memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku – suku yang terisolasi, terpinggirkan, dan terabaikan? nilai risiko sebesar 17,2.

Dengan demikian mitigasi untuk mengecilkan peluang dan dampak terhadap kejadian yang tidak diinginkan harus selalu dilakukan, terutama terhadap 6 (enam) hal yang diuraikan sesuai karakteristik pekerjaan masing – masing.

Kata Kunci: *risiko, pemberlakuan otonomi khusus*

ABSTRAK

Name : Samparisna O.Dj. Koibur

Study Program : Magister Manajemen

Title : Risk Analysis of The Implementation of Special Autonomy for the People of Papua in the District of Biak Numfor, Papua Province

This study aims to analyze the risks of the Special Autonomy For Papuan People in Biak Numfor Regency, Papua Province. The data of this study were obtained from the method of presenting data from the responses of respondents (Questionnaire), as well as the results of interviews with the parties concerned and also used research results that were relevant to the research object under study. In this case, primary data are from Biak Numfor Regency. The analysis using the approach used is the risk assessment matrix and analyzed with the Heat Map analysis model. The findings in this study indicate that in the business process of the Special Autonomy For Papua People in Biak Numfor Regency, Papua Province indicates that 15 (fifteen) things have a high risk assessment matrix value and there are 6 things that need special attention as follows; With regard to the implementation of human rights, has the Biak Numfor government established representatives of the national human rights commission, the human rights court, and the truth and reconciliation commission in Papua province in accordance with the legislation? the risk value is 18. Regarding religion, does the Biak Numfor government have the right and freedom to embrace their respective religions and beliefs? risk value of 18. Do Biak Numfor regional government officials already know that the implementation of the tasks of the provincial government, DPRP and MRP various matters relating to Finance: sources of provincial revenue, sources of original income of Papua province, balance funds of the Papua province, for natural resource yields, general location funds (DAU), etc. risk value of 17.06. Do the officials of the Regional Government of Biak Numfor know of the authority of Papua province, which covers all fields of government, except the authority in the fields of foreign politics, defense, security, monetary, fiscal, religious and judicial determined in accordance with statutory regulations? a risk value of 17.1. Has the Biak Numfor government carried out integrated environmental management by taking into account spatial planning, protecting living natural resources, non-living natural resources, artificial resources, conserving natural resources and their ecosystems, cultural preservation and biodiversity? risk of 17.2. Has the Biak Numfor government paid special attention and treatment to the development of isolated, isolated and neglected tribes? the value of risk is 17.2.

Thus mitigation to minimize opportunities and impacts on unwanted events must always be done, especially for 6 (six) things that are described according to the characteristics of each work.

Keywords: *Risk, Special autonomy*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Otonomi Khusus.....	13
1. Strategi Penggunaan Dana Otonomi Khusus	13
2. Otonomi Khusus Di Provinsi Papua.....	14
3. Manfaat Otonomi Khusus	15
4. Tantangan Implementasi Otonomi Khusus	15
5. Aspek – aspek Keberhasilan Pelaksanaan OTSUS	15

6.	Tinjauan Implementasi Atas Tolak Ukur Pelaksanaan Otonomi Khusus	16
7.	Gambaran Keadaan 4 Aspek Yang Menjadi Tolak Ukur Pelaksanaan Otonomi Khusus	17
8.	Defenisi Operasional Undang – Undang OTSUS.....	19
9.	Tahapan Pelaksanaan Otonomi Khusus	20
B.	Risiko.....	28
1.	Pengertian Risiko	28
2.	Pengertian Manajemen Risiko	29
C.	Penelitian Terdahulu.....	31
BAB	III	METODE PENELITIAN
A.	Proses Bisnis Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus	33
B.	Proses Transformasi Bisnis Pelaksanaan Otonomi Khusus	34
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	35
D.	Subjek dan Objek Penelitian	35
E.	Metode Pengumpulan Data	36
F.	Metode Pengolahan Data	38
G.	Teknik Manajemen Risiko	39
H.	Mengukur Peluang Dan Dampak	40
I.	Skala Untuk Melakukan Pengukuran	40
J.	Model Analisis Heat Map.....	41
K.	Teknik Analisis Data	41
BAB	IV	ANALISIS DAN HASIL INTERPRETASI
A.	Analisis Identifikasi Pengukuran Risiko	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Proses Identifikasi Risiko.....	31
Gambar 3.1.	Proses Bisnis Dalam Pelaksanaan Otsus.....	33
Gambar 3.2.	<i>Risk Assesment Matrix</i>	39
Gambar 4.1.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Sudah Melakukan: Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, Dan/Atau Penggabungan Kabupaten/Kota , Sudah Sesuai Atas Usul Provinsi Papua	43
Gambar 4.2.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Tahu Akan Kewenangan Provinsi Papua Yaitu Mencakup Seluruh Bidang Pemerintahan, Kecuali Kewenangan Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Moneter, Fiskal, Agama Dan Peradilan Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan?.....	45
Gambar 4.3.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Sudah Tahu Kewenangan Di Maksud Diatas Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Diberi Kewenangan Berdasarkan Undang – Undang Ini?	47
Gambar 4.4.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Tahu Bahwa Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Khusus Diatur Lebih Lanjut Dalam Perdasi Dan Perdusus?.....	49
Gambar 4.5.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Biak Numfor Sudah Tahu Akan Kewenangan Daerah Kabupaten Dan Daerah Kota Mencakup Kewenangan Yang Telah Diatur Dalam Perundang – Undangan?.....	50
Gambar 4.6.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Biak Numfor Tahu Bahwa Perjanjian Internasional Yang Dibuat Oleh Pemerintah Hanya Terkait Dengan Kepentingan Provinsi Papua Dan Dilaksanakan Setelah Mendapat Pertimbangan Gubernur Dan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan?	52
Gambar 4.7.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Biak Numfor Sudah Tahu Isi Dari Bab V.	

	Bentuk Dan Susunan Pemerintah Provinsi Papua?	54
Gambar 4.8.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Sudah Tahu Berbagai Hal Yang Menyangkut Badan Legislatif Yang Terkait Dengan: Kekuasaan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Anggota Dprp, Jumlah Anggota Dprp, Kedudukan Susunan, Tugas, Wewenang, Hak Tanggung Jawab, Kedudukan Keuangan Dprp Provinsi Papua?.....	56
Gambar 4.9.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Biak Numfor Sudah Tahu Berbagai Hal Yang Menyangkut Badan Eksekutif Yang Terkait Dengan: Pemimpin Dan Wakil Provinsi Papua Dipimpin Gubernur Dan Wakilnya, Tata Cara Pemilihan Gubernur Dan Wakilnya, Syarat – Syarat Menjadi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Kewajiban Gubernur Dan Wakilnya, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakilnya?	58
Gambar 4.10.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Provinsi Papua Sudah Tahu Berbagai Hal Yang Menyangkut Majelis Rakyat Papua Yang Terkait Dengan: Keanggotaan, Masa Keanggotaan Tugas Dan Wewenang, Hak Dan Kewajiban?	60
Gambar 4.11.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Pemda Provinsi Papua Sudah Tahu Bahwa Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Provinsi, Dprp Dan Mrp Berbagai Hal Yang Menyangkut Keuangan: Sumber – Sumber Penerimaan Provinsi, Sumber – Sumber Pendapatan Asli Provinsi Papua, Dana Perimbangan Bagian Provinsi Papua, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Lokasi Umum (Dau), Dll ?	62
Gambar 4.12.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Terkait Pelaksanaan Ham, Apakah Pemerintah Membentuk Perwakilan Komisi Nasional Ham, Pengadilan Ham, Dan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Biak Numfor Telah Sesuai Dengan Perundang – Udangan?	64
Gambar 4.13.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Terkait Pelaksanaan Ham Kaum Perempuan, Apakah Pemerintah Provinsi Telah Melakukan Kewajibannya Dalam Membina, Melindungi,	

	Hak – Hak Dan Memberdayakan Perempuan Secara Bermartabat Dan Melakukan Semua Upaya Untuk Memosisikan Perempuan Sebagai Mitra Seajar Kaum Lelaki?	67
Gambar 4.14.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Terkait Dengan Kekuasaan Dan Peradilan, Apakah Peradilan Adat (Peradilan Perdamaian Dilingkungan Masyarakat Hukum Adat), Sudah Berjalan Seperti Yang Diinginkan Masyarakat?	69
Gambar 4.15.	Gambar 4.15 Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Terkait Dengan Keagamaan, Apakah Pemerintah Biak Numfor Telah Memiliki Hak Dan Kebebasan Untuk Memeluk Agama Dan Kepercayaan Masing – Masing?.....	71
Gambar 4.16.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko dalam Memiliki Hak Dan Kebebasan Memeluk Agama, Apakah Pemerintah Biak Numfor Telah Menjamin Kebebasan, Membina Kerukunan, Dan Melindungi Semua Umat Beragama?	73
Gambar 4.17.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Melaksanakan Dan Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Pada Semua Jenjang, Jalur, Dan Jenis Pendidikan Di Provinsi Papua?	75
Gambar 4.18.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Menetapkan Kebijakan Umum Tentang Otonomi Perguruan Tinggi, Kurikulum Inti, Dan Standar Mutu Pada Semua Jenjang, Jalur Dan Jenis Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Perguruan Tinggi Di Papua?	77
Gambar 4.19.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Pengukuran Risiko Apakah Pemerintah Papua Dan Kabupaten/Koata Sudah Memberikan Bantuan Dan/Atau Subsidi Kepada Penyelenggara Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat?	79
Gambar 4.20.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Sudahkah Setiap Penduduk Biak Numfor Sudah Memperoleh Pendidikan Yang Yang Bermutu Sampai Dengan Tingkat Sekolah Menengah Dengan Beban Masyarakat Serendah – Rendahnya?	81

Gambar 4.21.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Provinsi Papua Sudah Melakukan Pencegahan Dan Menanggulangi Penyakit – Penyakit Endemis Dan/Atau Penyakit - Penyakit Yang Membahayakan Kelangsungan Hidup Penduduk?	82
Gambar 4.22.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Setiap Peduduk Biak Numfor Sudah Mendapat Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Dengan Beban Yang Serendah – Rendahnya?	84
Gambar 4.23.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Telah Merencanakan Dan Melaksanakan Program – Program Perbaikan Dan Peningkatan Gizi Penduduk, Dan Dalam Pelaksanaannya Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Dunia Usaha?	86
Gambar 4.24.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Mewujudkan Pemberdayaan, Peningkatan Dan Kualitas Dan Partisipasi Penduduk Asli Papua Dalam Sector Pembangunan Dan Memberlakukan Kebijakan Kependudukan?.....	88
Gambar 4.25.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Setiap Penduduk Biak Numfor Sudah Memperoleh Kesempatan Dan Diutamakan Mendapatkan Pekerjaan Dalam Semua Bidang Pekerjaan Berdasarkan Pendidikan Dan Keahliannya?	89
Gambar 4.26.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Terpadu Dengan Memperhatikan Piñata Ruang, Melindungi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Nonhayati, Sumber Daya Buatan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Cagar Budaya Dan Keanekaan Hayati?.....	91
Gambar 4.27.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Melaksanakan Kewajibannya Dalam Memelihara Dan Memberikan Jaminan Hidup Yang Layak Kepada Penduduk Provinsi Papua?.....	93

Gambar 4.28.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Memberikan Peran Yang Sebesar – Besarnya Kepada Masyarakat, Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Jaminan Hidup Yang Layak?	95
Gambar 4.29.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Sudah Memberikan Perhatian Dan Penanganan Khusus Bagi Pengembangan Suku – Suku Yang Terisolasi, Teerpencil, Dan Terabaikan?.....	97
Gambar 4.30.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Telah Menyelenggarakan Pemeritahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Transparan, Dan Bertanggung Jawab, Melakukan Pengawasan Hukum, Pengawasan Politik, Dan Pengawasan Sosial?.....	99
Gambar 4.31.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Para Pejabat Biak Numfor Sudah Tahu Akan Kewengan Daerah Kabupaten Dan Daerah Kota Mencakup Kewenangan Yang Telah Diatur Dalam Perundang – Undangan?	101
Gambar 4.32.	Diagram Peluang Dan Dampak Risiko Apakah Pemerintah Biak Numfor Telah Melakukan Pengawasan Represif Terhadap Perdusus, Perdasi, Dan Keputusan Gubernur?	103
Gambar 4.33	<i>Heat Map</i> Keseluruhan Risiko Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Rakyat Papua – Dikabupaten Biak Numfor – Provinsi Papua	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Skala Peluang Dari Kejadian yang Tidak Diinginkan.....	40
Tabel 3.2	Tabel Skala Dampak Dari Kejadian Yang Tidak Diinginkan	40
Tabel 3.3	Tabel Skala Bobot Risiko Dari Kejadian Yang Tidak Diinginkan	40
Tabel 3.4	Tabel Heat Map	41